

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya
Kabupaten Lampung Timur)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YAN PATMAWI SAKBAN

Npm : 1421020121

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**(Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya
Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Yan Patmawi Sakban

NPM. 1421020121

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos, M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi, ditandai dengan diikuti sertakan warga di dalam pengambilan kebijakan yang diatur dalam pasal 54, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memilih keanggotaan didalam Badan Permusyawaratan Desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 56 ayat (1) yaitu anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 4 aspek yaitu wilayah, perempuan, penduduk dan keuangan desa. Melihat aturan diatas maka sudah semestinya setiap desa melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Di dalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).

Maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya dan Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya dan untuk menganalisis perspektif *fiqh siyasah* terhadap keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu subjek pemikiran untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, Teknik Pengumpulan data didapat dari data primer yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait di desa Sumber Jaya dan data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Sepetember 2018, belum dapat menjalankan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya. Dikarnakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarnakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan

menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari pandangan *fiqh siyasah* seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, di dalam pemilihan anggota BPD di desa Sumber Jaya tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, namun tidak melanggar aturan perundang-undangan karena aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Yan Patmawi Sakban
NPM : 1421020121
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I
NIP. 195411131985031001

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos, M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA** (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan
Waway Karya Kanupaten Lampung Timur) disusun oleh Yan Patmawi
Sakban, NPM.1421020121, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati., S.Ag. M.H (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Eti Karini., S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Drs. H. M Said Jamhari., M.Kom.I. (.....)



DEKAN

Yan Patmawi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura 42:38).¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya:

1. Kedua Orangtuaku Alm. Bapak Romelan dan Ibu Nur Aini yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moril maupun materiil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
2. Untuk Saudari penulis Siti Nur Halimah dan Siti Nur Hasanah yang selalu jadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi panutan selaku kakak tertua serta menjadi kebanggan Keluarga Besar penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Yan Patmawi Sakban. Penulis dilahirkan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur, pada tanggal 4 Januari 1997, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara Siti Nur Halimah dan Siti Nur Hasanah, putra dari pasangan alm. Bapak Romelan dan Ibu Nur Aini.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Intan Pertiwi, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 20, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 6, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif di Organisasi:
 - a. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) sebagai Humas HMJ Siyasah Syar'iyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)”. sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., beserta staff dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. Alamsyah, S. Ag., beserta staff dan jajaranya.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., serta Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Frengki, M. Si.
4. Pembimbing I Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I., dan Pembimbing II Eko Hidayat, S.Sos, M.H., yang telah banyak meluangkan waktu serta

memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Warga masyarakat Desa Sumber Jaya yang telah membantu di dalam penelitian ini hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan Moril dari awal hingga terselesaikanya Skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabatku Faisal Abdaoe, Rendy Yusa Ambara, Alba Roma TW, Teguh Hermawan, Anton Kurnia, Sulthan bin Tahir, Nur Alfian, Sri Maryani, Anjeli Adelia, Virgi Ernanda, serta Ike Widiyasari yang selama ini telah sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi manfaat.

Akhir kata jika ditemui ada kesalahan dan kelalaian didalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2019

Yan Patmawi Sakban
NPM. 1421020121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah	20
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	24
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah.....	27
D. <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> /Badan Permusyawaratan	34
E. Kedudukan dan Peranan Wanita Menurut Konsep Islam	44
F. Syarat Laki-Laki dan Hak Politik Perempuan	48

BAB III KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BPD, DESA SUMBER JAYA, KECAMATAN WAWAY KARYA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur	54
1. Sejarah Desa Sumber Jaya	54
2. Keadan Geografis Desa Sumber Jaya	56
3. Keadan Demografi Desa Sumber Jaya.....	58
4. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Jaya	60
B. BPD menurut peraturan perundang-undangan Indonesia	61

- C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya67

BAB IV KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BPD DESA SUMBER JAYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

- A. Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada BPD Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur76
- B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada BPD Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan84
- B. Saran.....85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa(Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur)”**. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu penegasan dan penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini secara rinci sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²
- b. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.³

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

2. Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa

- a. Keterwakilan Perempuan, yaitu pemilihan untuk memilih perempuan warga desa sebagai anggota BPD.⁴
- b. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵

Jadi yang dimaksud dengan Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa yaitu memilih perempuan warga desa berdasarkan keterwakilan perempuan untuk diangkat menjadi anggota BPD.

³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.11.

⁴Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 8 ayat (1).

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (4).

3. Studi Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur

- a. Studi adalah kajian, telaah, penelitian dan penyelidikan ilmiah.⁶
- b. Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷
- c. Sumber Jaya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur yang dibagi menjadi 6 dusun.
- d. Kecamatan adalah unsur pembantu pemerintahan daerah di wilayah kecamatan yang langsung dipimpin oleh seorang camat, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
- e. Waway Karya adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki 11 Desa, dengan keberagaman suku di antaranya adalah Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Semendo, dsb. Daerah ini dapat dicapai dengan menempuh waktu 90menit dari Kota Bandar Lampung.
- f. Kabupaten adalah satuan-satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah yang di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

⁶Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PT. Modern English Pers, Balai Pustaka, 1989), h.861

⁷ C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.58

- g. Lampung Timur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana, dari hasil pemekaran kabupaten Lampung Tengah.

Jadi yang dimaksud dengan studi di Desa Sumber Jaya, kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur adalah suatu penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di Desa Sumber Jaya kecamatan Waway Karya, kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa** yaitu tentang partisipasi perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur yang dilihat dari sudut pandang ilmu tata negara Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis begitu pentingnya judul ini untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan dengan baik oleh panitia pembentuk BPD, namun didalam pemilihan tersebut tidak menerapkan salah satu aspek keterwakilan perempuan didalam pengisian anggota BPD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun

2014 tentang Desa pasal 58 ayat (1). Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang keterwakilan perempuan di dalam lembaga BPD Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi penulis pada umumnya.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga termasuk perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸

Untuk memilih keanggotaan didalam Badan Permusyawaratan Desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 56 ayat

⁸Ahmad Wildan dkk, "Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender", Diponegoro Law Journal, Volume 7 No.1, h.74 (On-line), tersedia di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, (2 September 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

(1) yaitu anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis,⁹ yaitu dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT), serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.¹⁰

Jumlah anggota BPD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 58 ayat (1), ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.¹¹ Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Sehingga untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016

⁹ Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 56 ayat (1).

¹⁰ Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 9 Ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 58 Ayat (1).

tentang BPD yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Didalam Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016, di dalam pasal 8 ayat (1) menyebutkan pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.¹² Sama halnya dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 dalam Pasal 6 tentang pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.¹³

Melihat aturan diatas maka sudah semestinya setiap desa melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dimana setiap desa memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Seperti yang terkandung didalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 8:

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, pasal 8 ayat (1).

¹³ Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 6.

kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.¹⁴

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 58, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD pasal 8 dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 6 tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sudah semestinya aturan ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Namun dalam kenyataan yang ada di lapangan, penulis melihat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya tidak memiliki wakil perempuan untuk menduduki keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Islam, partisipasi perempuan dalam kancah politik tidak dibedakan dengan laki-laki, namun ada beberapa perbedaan pendapat para ahli hukum Islam tentang partisipasi perempuan di kancah politik. *Pertama*, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. *Kedua*, perempuan diperbolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik laki-laki dengan hak politik perempuan.¹⁵

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan tanpa membedakan kedudukan dan jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-

¹⁴ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 8.

¹⁵ Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Amzah, 2002), h.107

laki dan perempuan adalah sama-sama *insan* (manusia) dengan segala potensi yang dimilikinya masing-masing dan memberikannya beban hukum yang sama tanpa adanya perbedaan.

Didalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).¹⁶ Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Apa yang telah terjadi di Desa Sumber Jaya membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalah yang timbul melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur).**

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.158

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur ?
2. Bagaimana persepektif *fiqh siyasah* terhadap keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur.
 - b. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap keterwakilan perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dari aspek teoritis

Hasi penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum positif maupun hukum Islam selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di

sampling literatur-literatur yang sudah ada tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

b. Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebaga pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian, terutama untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta untuk menjaga konsistensi penulis dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan suatu pendekatan serta metode penyusunan yang selaras dengan panduan penulisan skripsi fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2014, tentunya agar dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk memepelajari secara intensif dan mendalam tentang latarbelakang keadaan sekarang dan

interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.¹⁷

Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.¹⁸ Dalam hal ini penelitian dilakukan pada tanggal 25 september sampai 26 november 2018.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif.¹⁹ Melalui metode deskriptif ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan dari keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif *fiqh siyasah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik

¹⁷Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), h.24

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985),h.38

perorangan atau organisasi.²⁰ Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di desa Sumber Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.²¹ Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat

²⁰Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h.6

²¹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).h.8

dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.²²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.²³

Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati secara langsung tentang pelaksanaan keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *fiqh siyasah* untuk melihat pelaksanaan sebenarnya yang ada di lapangan.

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.²⁴ Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden melalui kuisioner.

²² Lexy J.Noleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.159.

²³Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70.

²⁴Muhamad Iqbal, *Op.cit.*, h.85.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang di wawancarai adalah Kepala Desa, sekertaris desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di desa Sumber Jaya.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁵ Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, traskip, buku, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sistem pemilihan BPD, cara pemilihan, tentang orang yang dapat memilih BPD, struktur organisasi BPD, jumlah anggota BPD serta beberapa catatan yang berkaitan dengan BPD.

²⁵Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h.112

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi, yang terdiri manusia, benda, tumbuh-tumbuhan dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.²⁶

Populasi ini merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Sumber Jaya maka di dapatkan bahwa populasi masyarakat yang mendiami Desa Sumber Jaya berjumlah 4.387 jiwa yang tersebar di 6 dusun dengan jumlah keseluruhan RT 25 wilayah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapat pertimbangan beberapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel. Dalam hal ini penelitian tidak menggunakan populasi tetapi menggunakan sampel.

²⁶ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.130

b. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu.²⁷ Yakni untuk memiliki responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari kepala dusun 3 orang, ketua RT 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang serta aparatur desa 6 orang.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²⁹ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1997), h.55

²⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115

²⁹ Susiadi, *Ibid*, h.115

d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.³⁰

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan,

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.45

dengan cara mulukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.³¹

Dalam menganalisis penelitian mula-mula mengumpulkan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

³¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh Siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.³²

Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).³³ Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara *etimologis* (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan,

³²Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

³³ Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.23.

memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³⁴ Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:³⁵ *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahha Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h.24

³⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.7.

³⁶ Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.26.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.³⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³⁸ Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik. Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.³⁹ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *Fiqh Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁴⁰

Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin Encyclopedia: "*Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society*"⁴¹

³⁷ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h.3

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h.28

³⁹ Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: eresco, 1971),

⁴⁰ H. A. Djazuli, *Op.Cit.* h.28

⁴¹ David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (Penguin Books: London, 2004), h.1219.

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintah, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat.

Ternyata, memang didalam definisi ilmu politik disini tidak disinggung sama sekali tentang kemasalahatan untuk rakyatnya atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Dengan demikian, rambu-rambu *fiqh siyasa* adalah: 1. Dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Saw; 2. *Maqashid al-syari'ah*; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.⁴²

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasa wadl'iyah* itu bukanlah *fiqh siyasa*, hanya saja selagi *siyasa wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.⁴³

⁴²*Ibid.*, h. 28.

⁴³*Ibid.*,

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴⁴ Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴⁵

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:⁴⁶

1. *Siyasah Dusturiyyah*(Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. *Siyasah Maliyyah*(Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyah*(Politik Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah*(Politik Peperangan)
5. *Siyasah Idariyyah*(Politik Administrasi Negara)

⁴⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), h.30.

⁴⁵ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.14.

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khaliif membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:⁴⁷

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Dauliyyah*
3. *Siyasah Maliyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasahal-shar'iyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiegy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁹

1. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Hasby Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h.40.

4. *Siyasah Qadhaliyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
5. *Siyasah Idariyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
8. *Siyasah Harbiyyah Shar'iiyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁵⁰

1. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iiyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan

⁵⁰ Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit.*, h.16

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁵¹ Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁵²

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

⁵¹ Agustina Nurhayati, *Op.Cit.*, h.42.

⁵² J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h.39.

perundang-undangan yang ditentukan oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁴ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:⁵⁵

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlailiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁵³Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.177.

⁵⁴H. A. Djazuli, *Op.Cit.* h.48.

⁵⁵*Ibid.*,

4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁵⁶

1. Perbedaan antara negara dan pemerintahan, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyatannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih kongkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan para fuqoha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintahan dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintahan, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqoha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang kongkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqoha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

⁵⁶Ibid., h.49.

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqoha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun.⁵⁷

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitutional* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk penyebutan suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵⁸

Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasannya sumber *fiqh dusturiyah* ada lima yakni:⁵⁹

1. Al-Quran al-Karim
2. Hadist, terutama yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*, h.53

⁵⁹*Ibid.*, h.54

3. Kebijakan-kebijakan Khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Menurut Suyuti Pulungan bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala masalah dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.⁶⁰ Selain itu ada yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang Siyasah Dusturiyah itu terdiri konstitusi, legislasi dan Syura atau demokrasi.

Kata *Syura* berasal dari akar kata *Sya-wa-ra*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁶¹ Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁶²

Al-Quran menggunakan kata *shura* dalam tiga ayat, yang pertama yaitu surat *al-Baqarah*, 2:223 yang membicarakan tentang kesepakatan

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-`Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid 4, h.434.

⁶² Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.214

(musyawarah) antara suami istri dalam menyapih anak sebelum dua tahun. Selanjutnya surat *Ali-Imran 3:159* dan *asy-Syura 42:38* yang berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam surat Ali-Imran, 3:159, Allah memerintahkan kepada Nabi Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.⁶³ Format musyawarah dan objeknya yang bersifat teknis, diserahkan kepada umat islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam Al-Quran. Agar prinsip syura ini dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Allah. Dalam bermusyawarahpun harus mem-pertimbangkan tiga hal, yaitu: masalah apa saja yang akan di musyawarahkan, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan.⁶⁴

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat yang salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, dan *Wizarah*.

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu al-Halli wa Al-Aqdi* dengan *al Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *Ahlul-syawkah*. sebagian lagi menyebutkan *ahl al-syura* atau *al-ijma*, sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *Al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota

⁶³*Ibid.*,

⁶⁴*Ibid.*, h. 220

masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.⁶⁵

Keberadaan *Ahlu al-Halli wa Al-Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam terutama Al-Quran dan Hadist dan melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi dalam Negara serta tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.⁶⁶ Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dimana kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan dari keburukan (kemudaratan) bagi manusia.⁶⁷

Dalam konteks saat ini keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dapat dikatakan sama dengan badan legislatif karena dapat dilihat dari persamaan tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu sama-sama membuat peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat (rakyat). Maka dari itu untuk

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.159

⁶⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.80.

⁶⁷ Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII No.1, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.64. (Online), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (7 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

mengetahui lebih lanjut, akan penulis paparkan tentang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* di sub bab selanjutnya.

D. *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*/ Badan Permusyawaratan

1. Definisi *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*

Istilah *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁶⁸

Bibit konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdul bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.⁶⁹

Istilah *Ahlul halli wa al-Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewangannya untuk

⁶⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.28

⁶⁹ Badri Yatim, *Ibid.*, h.35

melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* di dasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁷⁰

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, petani, para pemimin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.⁷¹

Dengan demikian, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latarbelakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat

⁷⁰J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.66-67

⁷¹*Ibid.*, h.69.

(lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli wa al-Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁷²

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedangkan yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan

⁷² Farid Abdul Khalid, *Op.Cit.*, h.78-79

penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya di patuhi.⁷³

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik. Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah, dan Syria.⁷⁴ Setelah Umar wafat, lembaga syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab.

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dikemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, dan dalam pemerintahannya Ali

⁷³ *Ibid.*, h.83

⁷⁴ J. Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.124-125

juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.⁷⁵

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli wa al-Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Hall wa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.⁷⁶

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul halli wa al-Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan Ahlul Halli wa al-Aqdi dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamah yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan

⁷⁵*Ibid*, h.150

⁷⁶Badri Yatim, *Op.Cit.*, h.40

mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.⁷⁷

Secara substansial mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu:⁷⁸

- a. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

⁷⁷ J. Sayuti Pulungan, Op.Cit., h.150

⁷⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.255.

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latarbelakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representatif dari seluruh masyarakat yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

2. Dasar *Ahlul Halli wa al-Aqdi*

Bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* atau Dewa Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fiqh kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Quran yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(Qs. Annisa, 4: 59)

Juga dalam firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ
أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).
(Qs. Annisa, 4: 83)

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat
dalam firman-Nya:

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imran, 3:104)

Tradisi musyawarah dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para *khulafa al Rasyidin* pada masa kepemimpinan mereka serta digunakan pula oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdidi* dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal. Islam melalui bahasa wahyu Al-Quran menggunakan istilah Syura/Musyawah, yang dijadikan sebagai landasan

utama dalam kemasyarakatan. Secara tegas disebut dalam (Qs. Asy-Syura 42:38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Qs. Asy-Syura 42:38).

Juga firmanNya Qs. Ali Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Qs. Ali Imran 159)

3. Tugas dan Wewenang *Ahlul Hall wa al-Aqdi*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁷⁹

Dari uraian para ulama tentang *Ahlul Hall wa al-Aqdi* ini tampak tugas dan wewenang nya sebagai berikut:⁸⁰

- a. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
- b. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan.
- c. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi pengawas dalam berjalannya pemerintahan.

⁷⁹ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit*, h. 80.

⁸⁰ H. A. Djazuli, *Op.Cit*. h.76

Didalam tugas dan wewenang *Ahlul Halli wa al-Aqdi* yang telah di jelaskan diatas, mempunyai kemiripan tugas dan wewenang dengan MPR dan DPR, yaitu wewenang nomor 1 dan 2 sama kewenangannya dengan MPR serta wewenang nomor 3 dan 5 sama kewenangannya dengan DPR dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

E. Kedudukan dan Peran Wanita Menurut Konsep Islam

Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah agama Islam datang, diseimbangkan (dinaikan) derajatnya. Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, hal itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya. Menurut ajaran Islam, pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Quran yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. (Qs. Az-Zariyat, 51: 56).

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang dibawa Rasulullah Swt. Untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka, kedudukan, hak, dan kewajiban wanita ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan pria.

Dalam banyak hal, wanita diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya.

Berikut ini adalah persamaan antara kedudukan pria dan wanita dalam Islam. Menurut Muhammad Tha'mah al-Qudhah, ada beberapa persamaan antara kedudukan wanita dan pria, di antaranya adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Sama nilai ketakwaannya. Manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda jenis kelamin, suku dan bangsa. Namun, yang dinilai paling mulia di sisi Allah bukan berdasarkan itu semua, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat:13

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

2. Keduanya diciptakan dari diri yang satu dan melewati fase-fase pertumbuhan yang serupa, yaitu dari air mani, darah, daging, tulang, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 1

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari-nya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan

⁸¹Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.50

perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

3. Pada dasarnya, laki-laki dan wanita sama nilainya. Ia menjadi mulia dan tinggi karena iman dan budi pekerti yang luhur. Ia menjadi hina dan rendah dengan ke kafiran dan penyimpangan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams: 7-10

“Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketawaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kesempatan beribadah, sama memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat al-Ahzab: 35

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan benar laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

5. Sama dalam martabat kemanusiaan, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takwir: 8-9

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh.”

6. Sama-sama berhak dalam berkesempatan menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits.

“Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).” (HR. Ibnu Majah)

7. Sama dalam hal menerima hukuman, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur: 2.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada agama Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksi oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

8. Sama dalam penilai iman dan amal, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imaran: 195

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan Berfirman), ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain....’

9. Sama-sama saling menolong da sama-sama mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah: 71

“Dan, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...”

10. Berhak mendapatkan nafkah dari orang tua bila ia sebagai anak dan berhak menerima nafkah bila ia seorang istri.

11. Wanita juga sama peluangnya dalam mengerjakan amal saleh (berkarier) dalam semua bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl: 97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan pengaruhnya yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih, takkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita juga tentu tidak lupa dengan peran ‘Aisyah, istri tercinta Rasulullah Saw. Banyak para sahabat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, menerima hadits darinya berkenaan dengan hukum-hukum agama, serta bagaimana Aisyah memimpin pasukan perang dalam perang basra atau perang jamal, untuk menuntut adanya keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulunya yaitu utsman bin affan melawan pasukan yang berpihak pada Ali bin Abi Talib.

F. Syarat Laki-Laki dan Hak Politik Perempuan

Kita sering mendengar syarat “laki-laki” dalam kewenangan pada pembahasan-pembahasan para ulama fiqh terdahulu dan sekarang, dengan beragam perbedaan seputar masalah itu. Sebagaimana kita juga dapat menemukan syarat itu dalam kewenangan peradilan, yaitu seperti pendapat Imam ath-Thabari bahwa perempuan boleh memimpin dalam masalahperadilan, namun Imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam hal yang berkaitan dengan masalah finansial.⁸²

Ketika pembahasan kita tentang “majelis permusyawaratan” secara khusus, maka ruang lingkup pembahasannya berkisar pada problem persamaan hak politik, adapun yang dimaksud dengan hak politik adalah hak-

⁸²Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit.*, h.122.

hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya, baik secara langsung maupun tidak, dalam urusan-urusan hukum dan administrasi. Seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak dalam mencalonkan diri.

Isu hak politik perempuan di kalangan para cendekiawan muslim sangatlah varian, yang kemudian dapat dikategorikan ke dalam 2 pendapat ada yang melarang ada yang membolehkan, yaitu:⁸³

1. Perempuan berpolitik dilarang

Kelompok ini memandang perempuan tidak memiliki hak politik dalam ajaran Islam. Kelompok ini meyakini *segregasi* (pembagian) ruang antara ruang publik (*al-wilayah al-ammah*) dan ruang domestik (*al-wilayah al-khassah*). Area publik termasuk kepemimpinan dianggap tanggung jawab laki-laki sementara ruang domestik yang mencakup tugas-tugas rumah tangga dianggap tanggung jawab perempuan.

Sepanjang sejarah Islam perempuan dianggap tidak masuk sama sekali dalam urusan politik. Sejak pada masa Nabi, menurut mereka, tidak ada satupun perempuan yang terlibat dalam urusan politik. Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi sebagai berikut:

- a. Pernyataan al-Quran tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (Qs. An-Nissa (4):34). Dan persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (Al-Baqarah(2):282).

⁸³*Ibid.*, h.123.

- b. Hadist Nabi Menyebutkan “Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus urusan mereka adalah perempuan”. (HR. Bukhari). Dan hadist lainnya menyebutkan “perempuan itu kurang akalanya dan agamanya”. (HR. Muslim).
 - c. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidikannya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih baik dari perempuan. (tafsir Ibnu Kasir 1:1:608).
 - d. Selain Al-Quran dan Hadist, ijma dan qiyas ulama juga sering dipakai untuk melegimitasi pemahaman bahwa perempuan secara biologi dan teologis tidak memiliki kapasitas rasional, sehingga tidak berhak menjadi pemimpin. Qiyas yang dimaksud adalah larangan perempuan menjadi imam untuk jamaah Laki-laki.
2. Bolehnya perempuan berpolitik

Kelompok ini memandang bahwa Islam memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam politik, sehingga tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk memperkuat pemikiran mereka kelompok ini menjadikan prinsip keadilan yang terdapat dalam Al-Quran sebagai landasan argumentasi mereka, yaitu: Ayat yang sering dikutip adalah Al-Taubah ayat 71, Al-Hujurat ayat 10 dan 49, dan Al-Isra ayat 17 dan 70. Pesan yang sangat kuat dalam ayat-ayat itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama antara laki-laki dan

perempuan, dan tidak ada pembeda antara keduanya berdasarkan jenis kelamin.


Munculnya kelompok di atas disebabkan perbedaan cara pandang, metode dan pendekatan tafsir yang digunakan para ulama sehingga mempengaruhi argumentasi dan kesimpulan yang di ambil terhadap teks Al-Quran. Satu pendekatan yang muncul adalah pendekatan tekstualis, bagi kelompok pertama penafsiran terhadap ayat didasarkan pada teks atau ayat saja dengan pendekatan kebahasaan. Kelompok ini memandang bahwa makna ayat terhadap pada bunyi ayat saja serta tidak mempertimbangkan bagaimana latarbelakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dan bagaimana latarbelakang turunnya hadis (*asbabul wurud*).

Perlu adanya penjelasan mengenai hadist Rasulullah Swt yang berbunyi: *Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus urusan mereka adalah perempuan*. Hadist ini termasuk hadist-hadist *ahad* (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (*zhanni*). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan suatu kejadian histori tertentu, yakni ketika sampai kepada RasulullahSwtberita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab belum berakhir.⁸⁴

⁸⁴ Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit.*, h.130.

Hadist ini merupakan pemberitahuan perihal suatu keadaan dan bukan Undang-Undang (Hukum) yang umum dan lazim. Sesuai dengan petunjuk fiqh hadist. Maka, disana ada beberapa indikasi yang membolehkan pengalihan makna dari makna lahirnya atau mengalihkan keumumannya menjadi khusus.⁸⁵

Mengangkat seorang pemimpin termasuk perkara politik yang tidak ada nash-nya secara jelas, apalagi menyatakan larangan mengangkat perempuan menjadi pemimpin jika dia memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang berkompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan. Seperti firman Allah dalam (Qs. An-Nisa: 58).⁸⁶

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Qs. An-Nisa, 4: 58)

Menurut Ibnu Hazm “ayat ini ditunjukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan”. Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*, h.131.

urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam AlQuran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara' dan logika.⁸⁷

Perlu disinggung juga bahwa hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin yang tersebut dalam hadis diatas dan apa yang dipahami oleh para ulama bahwa hadist ini menyatakan larangan menjadikan perempuan sebagai pemimpin, masih dipertimbangkan. Sebab pijakan pengeluaran hukum itu menurut kami bukan pada pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, melainkan rusaknya sistem hukum pada mereka dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya juga tidak menetapkan hukum antara manusia dengan adil, serta menyerahkan perkara mereka kepada perempuan yang tidak layak menjadi pemimpin, mereka memilih anak perempuan kiswa untuk menjadi pemimpin setelah kematian bapaknya. Inilah sebab tidak beruntungnya kaum yang disebutkan dalam hadist.

⁸⁷*Ibid.*, h.132.

BAB III

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUMBER JAYA, KECAMATAN WAWAY KARYA, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

1. Sejarah Desa Sumber Jaya

Atas penuturan pelaku sejarah dan saksi hidup dari warga Sumber Jaya, pada awalnya desa Sumber Jaya adalah merupakan wilayah dalam desa bungkuk kecamatan Jabung yang menjadi areal peladangan yang pada waktu itu desa Bungkuk di pimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama Abdul Manaf. Karna banyaknya Pendatang di sebarang sungai batang hari yang kemudian diberi nama kampung Pematang Tayas maka pada tahun 1977 dibentuklah salah satu pemerintahan yang disebut Dusun. Pada awalnya terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Pematang Tayas, dusun Karang Anom dan Dusun Sukamanah, pada tahun 1981 bertambah satu dusun lagi yaitu dusun Purwodadi.

Dengan bertambahnya jiwa dan KK akhirnya pada tahun 1998 dari keempat dusun yang ada sepakat untuk memisahkan diri dari Desa bungkuk menjadi Desa persiapan yang diberi nama Desa persiapan Sumber Rejo. Sampai pada akhirnya pada tanggal 10 April 1994 Desa Sumber Rejo berubah Setatus menjadi Desa Dipinitif yang dipimpin oleh Kepala Desa SURYADI hasil dari Pemilihan.

Seiring dengan bertambahnya penduduk masih dalam pemerintahan Suryadi dipisahlah dusun Sukamanah, Purwodadi, dan Umbul Baru (yang sekarang dusun Bangun Sari) menjadi Desa Persiapan yang diberi nama Desa Sumber Jaya pada bulan maret 1998. yang dipimpin oleh Bapak ABDUL ROHMAN.

Kemudian pada bulan Nopember 1998, terjadi huru hara yang mengakibatkan kepala Desa ABDUL ROHMAN harus meninggalkan Desa Sumber Jaya, yang kemudian masyarakat mengangkat OPA WIJAYA untuk melanjutkan Kepemerintahan Sumber Jaya. Yang pada akhirnya pada tanggal 03 April 2000 Desa Sumber Jaya Resmi menjadi desa Definitif.

Pada tanggal 26 September 2002 masa jabatan Bapak OPA WIJAYA dilanjutkan Oleh Pejabat Sementara Bapak WAGIMAN TEGUH PRAYITNO. Pada bulan Maret 2003 diadakan Pemilihan Kepala Desa Sumber Jaya dan yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak OPA WIJAYayang menjabat sampai Tahun 2011 Kemudian pada Tanggal 21 Desember 2012 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah UMAR DANI yang menjabat sampai tahun 2017 dan pada Tanggal 04 Desember 2017 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah UMAR DANI sampai sekarang.⁸⁸

Adapun nama daripada Kepala Desa yang pernah menjabat dari tahun 1998 samapai 2023.

⁸⁸RPJMDes SUMBER JAYA (2018-2023).

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	Maret - Nop 1998	ABDUL ROHMAN	PJS Desa Persiapan
2.	Nop 1998 - sep 2002	OPA WIJAYA	PJS Desa Persiapan
3.	2002 s/d 2003	WAGIMAN TEGUH PRAYITNO	PJS Desa Persiapan
4.	2003 s/d 2009	OPA WIJAYA	Kades Hasil Pilihan
5.	2009 S/D 2011	OPA WIJAYA	PJS
6.	2011 S/D 2011	OPA WIJAYA	PJS
7.	2012 S/D 2017	UMAR DANI	Hasil Pilkades 2011
8.	2018 S/D 2023	UMAR DANI	Hasil Pilkades 2017

Sumber: Profil Desa Sumber Jaya

2. Keadaan Geografis Desa Sumber Jaya⁸⁹

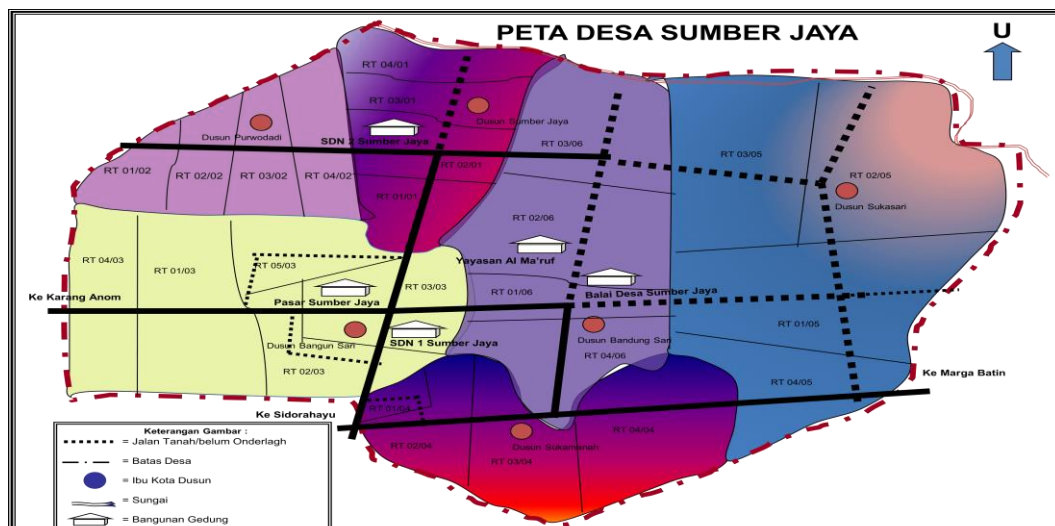
a. letak dan luas wilayah

Secara Geografis Desa Sumber Jaya merupakan salah satu desa dari 11 desa di wilayah Kecamatan Waway Karya yang terletak 6 Km arah Selatan dari Kecamatan Waway Karya yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama 10 menit, Desa Sumber Jaya mempunyai luas wilayah

⁸⁹ RPJMDes SUMBER JAYA (2018-2023)

seluas mencapai 1.783 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa keseluruhan sebanyak 4.387 Jiwa.

Secara topografi Desa Sumber Jaya memiliki Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar 882 Ha, dan Desa Sumber Jaya memiliki Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 70 mdpl, rata-rata suhu udara 26 - 30 °C, Curah Hujan 1.272 mm/thn, Kelembaban udara 28 °C, Kecepatan angin 20 km/jam. Dengan Luas lahan pemukiman 1.104 Ha, Luas lahan pertanian Sawah teririgasi 0 Ha, Sawah tadah hujan 679 Ha.



Sumber: Profil Desa Sumber Jaya

Batas wilayah Desa Sumber Jaya :

Sebelah Utara : Desa Bungkuk

Sebelah Selatan : Desa Sidorahayu

Sebelah Timur : Desa Marga Batin

Sebelah Barat : Desa Karang Anom

b. Orbitasi

Orbitasi atau jarak tempuh dari pusat-pusat pemerintahan:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 45 km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 52 km
4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 230 km

3. Keadaan Demografi Desa Sumber Jaya⁹⁰

a. Keadaan Penduduk

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, struktur, dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Sumber Jaya adalah 4.387 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table berikut:

Dusun	Jumlah Kk	Jiwa Laki-Laki	Jiwa Perempuan	Jumlah Jiwa
Sumber Jaya	160	324	322	646
Purwodadi	191	399	385	784
Bangun Sari	213	443	405	848
Sukamanah	172	376	376	752
Sukasari	179	348	348	696
Bandung Sari	153	315	315	630
Jumlah	1.065	2.250	2.137	4.387

⁹⁰ RPJMDes SUMBER JAYA (2018-2023)

b. Data Jumlah Dusun, RT, dan RW.

1. Jumlah Dusun : 6 Wilayah
2. Jumlah RW : 6 Wilayah
3. Jumlah RT : 25 Wilayah

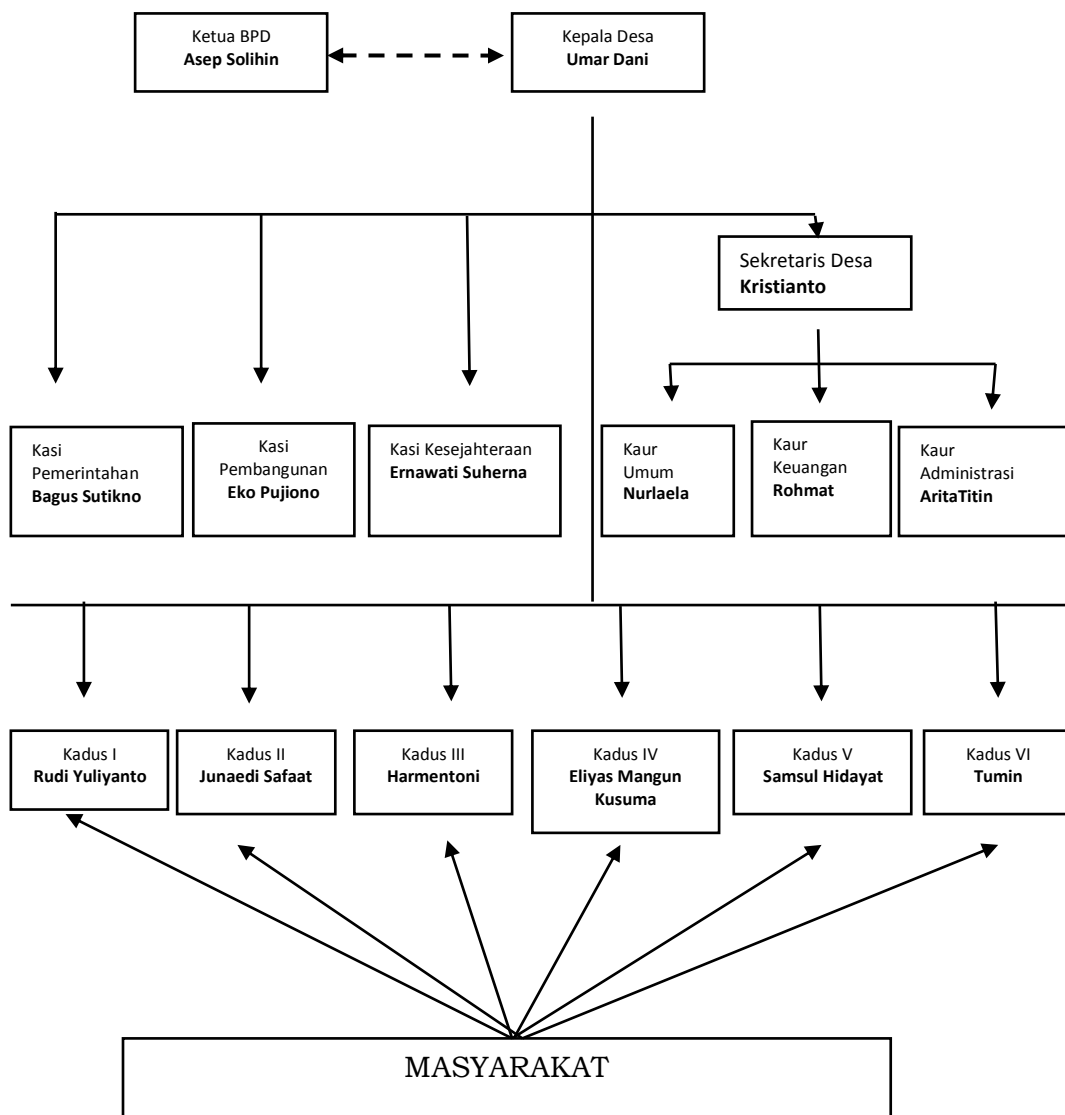
c. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. keadaan sosial penduduk Desa Sumber Jaya tersaji dalam table berikut.

Uraian	Jumlah	Satuan	Ket.
Tingkat Pendidikan			
1. Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	1.528	Jiwa	
2. Tamat SD/Sederajat	2.092	Jiwa	
3. Tamat SMP/Sederajat	577	Jiwa	
4. Tamat SMA/Sederajat	184	Jiwa	
5. Tamat S1 keatas	20	Jiwa	
Agama			
1. Islam	4.394	Jiwa	
2. Kristen Katholik	7	Jiwa	
3. Kristen Protestan	0	Jiwa	
4. Hindu	0	Jiwa	
5. Budha	0	Jiwa	
6. Konghucu	0	Jiwa	

4. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Jaya

a. Struktur Pemerintahan Desa Sumber Jaya 2018-2023.⁹¹



⁹¹Umar Dani, Wawancara Kepala Desa Sumber Jaya, Tanggal 26 Oktober 2018

b. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Daftar anggota BPD Desa Sumber Jaya 2018-2024 adalah sebagai berikut:⁹²

No.	NAMA	JABATAN
1.	ASEP SOLIHIN	KETUA
2.	SUNARYO	SEKERTARIS
3.	OPA WIJAYA	ANGGOTA
4.	EDI LASONO	ANGGOTA
5.	NUR AKIB	ANGGOTA
6.	JAJANG	ANGGOTA
7.	DADANG	ANGGOTA
8.	SUHENDRA	ANGGOTA
9.	SUTRISNO	ANGGOTA

B. BPD Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

⁹²Asep Solihin, *Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumber Jaya*, Tanggal 26 Oktober 2018.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁹³

Demi menegaskan peranan Badan Permusyawaratan Desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 juni 2016. Serta menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa dan mulai berlaku sejak di undangkan pada 10 januari 2017. Dengan maksud untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa.

2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara

⁹³A. W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h.35.

khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.⁹⁴

Dengan masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁹⁵

3. Fungsi, Tugas dan Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pada pasal 31 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:⁹⁶

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada pasal 32 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 BPD mempunyai tugas untuk:⁹⁷

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

⁹⁴ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h.67.

⁹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, pasal 3.

⁹⁶ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 31.

⁹⁷ *Ibid.*, pasal 32.

- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:⁹⁸

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kemudian pada pasal 55, hak anggota BPD untuk:⁹⁹

⁹⁸*Ibid.*, pasal 51.

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, serta keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel yang di dukung dengan pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa sehingga harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan

⁹⁹*Ibid.*, pasal 55.

Permasyarakatan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.

4. Keanggota Badan Permasyarakatan Desa

Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 di dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu:¹⁰⁰

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.

Untuk memilih atau menyaring calon anggota BPD maka harus memperhatikan aturan pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 13 yang menjelaskan tentang persyaratan calon anggota BPD yaitu:¹⁰¹

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, Pasal 14.

¹⁰¹ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 13.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Keterwakilan Perempuan pada BPD di Desa Sumber Jaya.

Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya memilih anggota yang mampu memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPD namun harus memiliki keberanian dan kapasitas, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, berupa program-program yang mampu menjawab atas kebutuhan-kebutuhan strategis, sehingga bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap ataupun sebagai penggugur kewajiban dalam keterwakilan perempuan, tetapi juga sebagai penggerak dan perancang suatu program

untuk menggerakkan kaum perempuan dalam rangka mendukung setiap tahapan pembangunan desa.

Dari persyaratan calon anggota BPD yang telah disebutkan pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 13, seharusnya tidaklah sulit bagi perempuan untuk dapat menempati posisi sebagai anggota BPD. Namun, dalam pelaksanaannya hasil yang di dapatkan tidak mampu menempatkan seorang perempuan dalam posisi sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Bila melihat dari jumlah penduduk yang bermukim di Desa Sumber Jaya, maka akan di dapatkan jumlah penduduk sebesar 4.387 jiwa. Sehingga bila mengikuti aturan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 Tentang BPD pasal 14, Desa Sumber Jaya dapat memilih anggota BPD sebanyak 9 orang.¹⁰²

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Kepala Dusun Bandung Sari, mengungkapkan bahwa:¹⁰³ Pelaksanaan musyawarah desa telah dilakukan pada tanggal 17 september 2018 di balai Desa Sumber Jaya, yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RT, serta masyarakat perwakilan dusun. Sebelum adanya musyawarah yang dilakukan pada tanggal 17 September 2018, kepala desa telah membentuk tim panitia pembentuk BPD sesuai dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 9, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat

¹⁰²Kristianto, *Wawancara dengan Sekertaris Desa Sumber Jaya*, Tanggal 26 Oktober 2018.

¹⁰³ Samsul Hidayat, *Wawancara dengan Kepala Dusun Sukasari Desa Sumber Jaya*, 26 Oktober 2018.

dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dengan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Komposisi anggota tim panitia pembentuk BPD Desa Sumber Jaya berjumlah 3 orang yang berasal dari aparat desa yaitu Bapak Bagus Sutikno, Eko Pujiono dan Ernawati Suherman, dan dari pihak masyarakat atau tokoh masyarakat diwakili oleh 6 orang yaitu Bapak Wagiman, Sugiyanto, Turiman, Slamet Wijaya, Arif Munandar dan Aji Santoso.¹⁰⁴

Dari kesepakatan yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan panitia pembentuk BPD, maka setiap dusun harus mencalonkan 2 (dua) orang dari setiap dusunnya, sehingga akan terkumpul 12 orang calon anggota BPD dari 6 dusun yang ada di wilayah Desa Sumber Jaya. Lalu tugas masing-masing panitia pembentuk BPD adalah mensosialisasikan adanya pemilihan anggota BPD kepada masyarakat Desa Sumber Jaya sesuai asal dusunnya masing-masing.¹⁰⁵

Dari ke 12 nama calon yang telah diajukan kepada panitia pembentuk BPD, lalu akan melalui tahap penyaringan oleh panitia pembentuk BPD Desa Sumber Jaya dengan memperhatikan keterwakilan wilayah,¹⁰⁶ seperti yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 7, sehingga muncul nama-nama calon dari setiap dusunnya sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁴ Bagus Sutikno, *Wawancara dengan Ketua Panitia Pembentuk BPD Desa Sumber*, 27 Oktober 2018.

¹⁰⁵ Doni Wijaya, *Wawancara Ketua RT 1 Dusun Purwodadi Desa Sumber Jaya*, 26 Oktober 2018.

¹⁰⁶ Slamet Wijaya, *Wawancara dengan Panitia Pembentuk BPD Desa Sumber Jaya*, 27 Oktober 2018

¹⁰⁷ Bagus Sutikno, *Op.cit.*, 27 Oktober 2018

NO.	NAMA	DUSUN
1.	ASEP SOLIHIN	BANDUNG SARI
2.	OPA WIJAYA	
3.	SUNARYO	SUMBER JAYA
4.	EDI LASONO	
5.	NUR AKIB	PURWODADI
6.	SAHRUDIN	
7.	ANTON KURNIA	SUKAMANAH
8.	JAJANG ISKANDAR	
9.	SUHENDRA	SUKASARI
10.	FERRI KARDIYANTO	
11.	DADANG MAHMUD	BANGUN SARI
12.	SUTRISNO	

Dari ke 12 nama calon tersebut, hanya akan ada 9 orang yang akan menjadi anggota BPD, dikarenakan sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 14 ayat (2).¹⁰⁸

Sebelum adanya pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumber Jaya yang berlangsung tanggal 17 September 2018, masyarakat telah mengajukan nama-nama yang akan di seleksi oleh panitia pembentuk BPD, namun dari 12 nama calon yang diajukan oleh masyarakat tidak ada di

¹⁰⁸Junaedy, Wawancara dengan Kepala Dusun Purwodadi Desa Sumber Jaya, 26 Oktober 2018.

antaranya terselip perempuan.¹⁰⁹ Meskipun sudah jelas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di dalam pasal 58, Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bagus Sutikno selaku ketua dalam panitia pembentuk BPD Desa Sumber Jaya, di dapatkan keterangan bahwa: Dari ke 12 calon yang telah di usulkan masyarakat, panitia pembentuk BPD Desa Sumber Jaya langsung bekerja untuk mengadakan musyawarah di balai Desa Sumber Jaya yang berada di Dusun Bandung Sari, dengan memanggil para tokoh masyarakat, ketua dusun, ketua RT, aparatur desa, dan perwakilan masyarakat. Dengan agenda pemilihan anggota BPD pada tanggal 17 september 2018, pemilihan anggota dilakukan dengan pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Yang akhirnya memunculkan nama-nama yang dipilih oleh masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai anggota BPD desa Sumber Jaya, yaitu: Asep Solihin, Sunaryo, Opa Wijaya, Edi Lasono, Nur Akib, Jajang, Dadang, Suhendra dan Sutrisno.¹¹⁰

Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan sebagai anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi bahwa di dalam Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun dalam kenyataanya masyarakat belum mengetahuinya. Sehingga masyarakat hanya mencalonkan

¹⁰⁹ Kuncoro, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Jaya*, 13 Oktober 2018.

¹¹⁰ Bagus Sutikno, *Op.Cit.*, 26 Oktober 2018.

calon yang menurut mereka mampu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa mempertimbangkan mencalonkan perempuan. Sehingga hasilnya pun di dapatkan bahwa yang terpilih adalah laki-laki.

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan ketua RT 2 dusun Sumber Jaya Desa Sumber Jaya saat di wawancara,¹¹¹ menurut beliau, didalam pemilihan calon anggota BPD desa Sumber Jaya, kurang dijelaskan oleh panitia pembentuk BPD tentang adanya keterwakilan perempuan di dalam BPD, yang kami pahami bahwa pemilihan anggota BPD hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda adalah pengurangan anggota BPD yang awalnya 11 orang, sekarang menjadi 9 orang, dan panitia hanya menjelaskan bahwa setiap dusun diperbolehkan mengajukan calonnya sebanyak 2 orang saja.

Keterwakilan Perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 58, Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 6 dan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 8. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sumber Jaya belum banyak masyarakat yang mengetahui hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun informasi yang di dapatkan.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, menurut bapak Edy Lasono selaku anggota BPD Desa Sumber Jaya menerangkan bahwa:¹¹² Pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukan

¹¹¹ Idrus Solihin, *Wawancara Ketua RT 2 Dusun Sumber Jaya Desa Sumber Jaya*, 27 Oktober 2018.

¹¹² Edy Lasono, *Wawancara dengan Anggota BPD Desa Sumber Jaya*, 26 Oktober 2018

tidak mensosialisasikan adanya perubahan ataupun penambahan di dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku tentang BPD. Namun menurut beliau, dari segi waktu kurang efektif dikarenakan dari mulai disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang ataupun Perda, hanya 1 kali adanya sosialisasi tentang BPD. Yaitu pada tanggal 28-29 Juli tahun 2018 di hotel Horison Bandar Lampung dengan diwakili 2 orang dari anggota BPD Desa Sumber Jaya.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa: kurangnya informasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat tentang adanya peraturan baru yang harus memperhatikan keterwakilan wanita, sehingga masyarakatpun tidak mengetahui adanya aturan tersebut.¹¹³

Dari hasil penelitian yang penulis amati di Desa Sumber Jaya, masyarakat desa masih lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan publik.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sumber JayaDesa Sumber Jaya dalam pencalonan anggota BPD, beliau mengirimkan 2 orang calon bernama Sunaryo dan Edy Lasono, hal ini disebabkan karena

¹¹³ Asep Solihin, *Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumber Jaya*, 29 Oktober 2018.

bapak edy lasono adalah anggota BPD pada masa jabatan 2012-2018 dan dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga di anggap perlu untuk melanjutkan masa jabatannya, sedangkan bapak sunaryo adalah mantan kepala dusun yang sudah pasti teruji kepemimpinannya, sehingga masyarakat meminta beliau maju sebagai calon anggota BPD mewakili dusun sumber jaya.¹¹⁴

Dilain kesempatan penulis bertanya kepada Bapak Rudi Yulianto selaku Kepala Dusun Sumber Jaya, tentang tanggapannya tidak mencalonkan perempuan sebagai anggota BPD, dikarenakan kurangnya informasi tentang dasar hukum keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dan cukup sulit untuk mencari calon anggota BPD dari perempuan.

Dari hasil penelitian yang penulis teliti di Desa Sumber Jaya mendapatkan hasil bahwa dari struktural penting yang ada di Pemerintahan Desa hampir seluruhnya di pegang oleh laki-laki, hanya segelintir posisi yang di pegang oleh perempuan. Dikarnakan perempuan cenderung untuk memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan yang lembut (tidak banyak mengeluarkan ide-ide atau gagasan).

Senada dengan hasil wawancara Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Jaya menjelaskan bahwa:¹¹⁵ Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan

¹¹⁴ Rudi Yulianto, *Wawancara Kepala Dusun Sumber Jaya Desa Sumber Jaya*, 29 Oktober 2018.

¹¹⁵ Ernawati Suhera, *Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Sumber Jaya*, 28 Oktober 2018.

tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki.

BAB IV

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BPD DESA SUMBER JAYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan Pada BPD Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur

Dari hasil penelitian yang penulis teliti pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, mendapatkan sampel di dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari kepala dusun 3 orang, ketua RT 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang serta aparatur desa 6 orang. Sebelum adanya pemilihan BPD telah disepakati oleh Kepala Desa dan panitia pembentuk BPD untuk setiap dusun diperbolehkan mencalonkan 2 (dua) orang dari setiap dusunnya, sehingga akan terkumpul 12 orang calon anggota BPD dari 6 dusun yang ada di wilayah Desa Sumber Jaya. Dari ke 12 nama calon yang telah di ajukan kepada panitia pembentuk BPD, akan melalui tahap penyaringan oleh panitia pembentuk BPD Desa Sumber Jaya dengan memperhatikan Syarat-Syarat yang telah di buat dan disepakati sebelumnya.

Akan tetapi dari hasil penelitian yang penulis teliti dari ke 12 calon tersebut tidak ada keterwakilan perempuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 58 ayat (1) yaitu jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08

tahun 2016 pasal 8 ayat (1) yaitu pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 6 yang berbunyi:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan

Menurut Idrus Solihin Ketua RT 2 Dusun Sumber Jaya, didalam pemilihan calon anggota BPD desa Sumber Jaya, kurang dijelaskan oleh panitia pembentuk BPD tentang adanya keterwakilan perempuan di dalam BPD, yang kami pahami bahwa pemilihan anggota BPD hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda adalah pengurangan anggota BPD yang awalnya 11 orang, sekarang menjadi 9 orang.

Sedangkan menurut bapak Edy Lasono selaku anggota BPD Desa Sumber Jaya menerangkan bahwa Pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukan tidak mensosialisasikan adanya perubahan ataupun penambahan di dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku tentang BPD. Namun menurut beliau, dari segi waktu kurang efektif dikarnakan dari mulai disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang ataupun Perda, hanya 1 kali adanya sosialisasi tentang BPD. Yaitu pada tanggal 28-29 Juli tahun 2018 di hotel Horison Bandar Lampung dengan diwakili 2 orang dari anggota BPD Desa Sumber Jaya.

Dari hasil yang penulis teliti mengapa tidak adanya keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya dikarnakan:

1. Kurangnya informasi tentang dasar hukum keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dan sulit mencari calon anggota BPD dari perempuan.
2. Masyarakat desa masih bercorak patriarkis atau lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan publik.
3. Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki.

B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada BPD di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau

suara masyarakat. Menurut Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung

dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* disamping itu punya hak pilih juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Dan untuk pembahasan kali ini mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan menurut Fiqh Siyasah, banyak pendapat para ulama mengenai keterwakilan perempuan didalam kepemimpinan khususnya didalam lembaga perwakilan. Namun mayoritas ulama mensyaratkan laki-

laki sebagai pemimpin, berdasarkan Nash hadist yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan.

Hadist diatas termasuk hadist-hadist *ahad* (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (*zhanni*). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab belum berakhir.


Mereka (bangsa Persia) menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan kiswa, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah, hadist ini gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga merupakan firasat hati dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah negara dan kehancurannya.

Mengangkat dari hadist bahwasanya tidak ada nash nya secara jelas yang melarang keterwakilan perempuan didalam lembaga perwakilan. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kempeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang

melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda.

Hal semacam ini memang ada secara syara dan logika. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Bila melihat kembali tentang keterwakilan perempuan pada BPD, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota BPD khususnya di Desa Sumber Jaya, karena didalam aturan *fiqh siyasah* tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah di atur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota BPD.

Seharusnya bila dipandang dalam ilmu *fiqh siyasah*, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataanya yang terjadi pada BPD Desa Sumber Jaya di dalam pemilihan anggota BPD tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan didalam keanggotaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018, belum dapat menjalankan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya. Dikarnakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarnakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Dari pandangan *fiqh siyasah* seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, namun dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan pada BPD Desa Sumber Jaya, didalam pemilihan anggota BPD

tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan di dalam keanggotaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya menjalankan aturan yang telah dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, dalam Islam ketika tidak ada keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah dan ketika ada Islam memperbolehkan dan membenarkannya, namun bila dilihat dari aturan perundang-undangan aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat mensosialisasikan kembali tentang keterwakilan perempuan pada BPD.
2. Ditujukan kepada Kepala Desa dan Panitia Pembentuk BPD Desa Sumber Jaya untuk dapat menekankan adanya keterwakilan perempuan pada BPD dengan cara setiap dusun diwajibkan mencalonkan 1 (satu) orang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- Ahmad Wildan dkk, “Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 7 No.1, h.74 (On-line), tersedia di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Diakses pada tanggal 2 September 2018 pada pukul 21.20.
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Amir syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, CV. Angkasa Raya, Padang, 1990.
- A. W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakrta 1997.
- C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, Penguin Books, London, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2003.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amzah, Jakarta, 2005.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Kutub, Yogyakarta, 2004.
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ibn Manzhur, *Lisan al-`Arab*, Dar al-Shadir, Beirut, 1968.
- Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, Amzah, Jakarta, 2002.
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, IAIN Press, Surabaya, 2011.

- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Lexy J. Noleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-X, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1991.
- Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-'Adalah Vol.XII No.1, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.64. (Online), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pada pukul 20.22.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971.

Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD

Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa